

Model Pemberdayaan Pengelolaan Wisata Telaga Madirda untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung di Masa Pandemi COVID-19

Yitno Puguh Martomo ^{1, }, Samsi ^{2,* }, Erwinda Sam Anafih ^{3, },
dan Liem Gai Sin ^{4, }

1 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Surakarta, 57771, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Administrasi, Program Magister,
Universitas Surakarta, 57771, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

3 Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Komunikasi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Karanganyar, 57761, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia

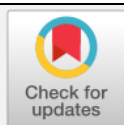
4 Program Studi Manajemen Inovasi, Program Magister,
Universitas Ma Chung, 65151, Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

* Korespondensi: samsi_rosi@unsa.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Martomo, Y. P., Samsi, S., Anafih, E. S., & Sin, L. G. (2022). Empowerment Models of Telaga Madirda Tourism Management to Increase Visitors during the COVID-19 Pandemic. *Society*, 10(2), 706-722.

DOI: [10.33019/society.v10i2.498](https://doi.org/10.33019/society.v10i2.498)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Telaga Madirda, sebuah destinasi wisata desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, memiliki pesona alam yang eksotis dan siap untuk dikembangkan. Studi ini menyelidiki model pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Berjo dan mengeksplorasi pendekatan inovatif untuk mengelola potensi wisata ini. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, studi ini menggunakan pendekatan model pemberdayaan melalui tiga tahap: penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan. Temuan menunjukkan bahwa komitmen para pemimpin desa mendukung proses pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Berjo, sehingga memungkinkan model acara yang inovatif untuk menarik lebih banyak pengunjung. Pengenalan wisata spiritual dan berkemah di malam hari telah menarik banyak orang ke Telaga Madirda, yang menawarkan tempat istirahat untuk relaksasi dan terapi selama pandemi COVID-19.

Dikirim: 3 November, 2022;
Diterima: 24 Desember, 2022;
Dipublikasi: 30 Desember, 2022;

Kata Kunci: *Badan Usaha Milik Desa; Desa Berjo; Model Pemberdayaan; Pengelolaan Pariwisata; Telaga Madirda*

1. Pendahuluan

Meningkatkan pendapatan desa dan memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan merupakan tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dikerahkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini. Inisiatif pengentasan kemiskinan telah mendapatkan daya tarik di berbagai sektor, mulai dari upaya pemerintah melalui program-program unggulan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat muncul sebagai strategi utama dalam upaya kolektif ini. Pendekatan ini sejalan dengan pernyataan Widayanti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dan merupakan strategi yang relevan dalam memerangi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat lokal (Widayanti, 2012). Inti dari pemberdayaan masyarakat terletak pada penguatan masyarakat untuk mengatasi tantangan mereka dan membekali mereka untuk menavigasi kompleksitas kehidupan.

Inisiatif pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam berbagai program, termasuk mengembangkan destinasi pariwisata potensial di dalam desa. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan prospek ekonomi masyarakat. Dengan mengembangkan destinasi pariwisata di dalam desa, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan kunjungan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pendekatan ini mengikuti kebijakan pemerintah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015, yang menekankan promosi pariwisata berbasis pedesaan (desa wisata) untuk merangsang kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dan mencegah migrasi dari desa ke kota. Selain itu, pengembangan desa wisata juga mendorong upaya pelestarian lingkungan, melestarikan lanskap alam, sawah, sungai, danau, dan telaga, sehingga dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Program desa wisata yang diterapkan di destinasi wisata Telaga Madirda menjanjikan untuk mendorong pengembangan masyarakat. Daerah Karanganyar, yang terkenal dengan sebutan INTANPARI (industri, pertanian, dan pariwisata), memiliki potensi wisata alam dan budaya yang melimpah. Namun, sumber daya ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur wisata.

Industri pariwisata global mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan kemajuan peradaban dan adopsi gaya hidup yang semakin modern. Ketika individu mencari jalan untuk kepuasan pribadi dan keluarga di tengah kesibukan kerja, kegiatan pariwisata telah muncul untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Menyadari prospek yang menjanjikan dari pengembangan pariwisata, hampir semua negara modern, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata di tingkat nasional, regional, dan desa.

Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sektor pariwisata di seluruh dunia. Banyak destinasi wisata di seluruh Indonesia terpaksa ditutup, dan banyak kegiatan yang telah direncanakan harus dibatalkan untuk mencegah penyebaran virus. Penutupan destinasi-destinasi tersebut menimbulkan kesulitan ekonomi bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini sejalan

dengan temuan Espinoza-Figueroa *et al.*, yang menyatakan bahwa pariwisata berfungsi sebagai pilar penting bagi pemerintah, menghasilkan pendapatan daerah dan kesempatan kerja, serta berperan dalam promosi budaya dan identitas (Espinoza-Figueroa *et al.*, 2021). Akibatnya, industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar dan muncul sebagai salah satu sektor yang paling terpuak selama krisis yang tak terduga ini.

Desa Berjo mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2008 untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga ini terus mengeksplorasi berbagai bisnis berbasis desa. Setelah melalui musyawarah desa, Pemerintah Desa Berjo menunjuk Badan Usaha Milik Desa Berjo untuk mengawasi pengelolaan beberapa potensi wisata.

Sejak didirikan pada tahun 2008, Badan Usaha Milik Desa Berjo telah dipercaya untuk mengelola berbagai aset wisata di desa, dimulai dengan wisata Air Terjun Jumog. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab mereka semakin meluas, dan puncaknya adalah pengelolaan Telaga Madirda pada awal tahun 2020. Namun, tanggung jawab baru ini bertepatan dengan dimulainya pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi Indonesia dan Desa Berjo.

Di tengah kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi, pengelolaan lokasi wisata Telaga Madirda menjadi upaya yang sangat penting bagi BUMDes. Hal ini menjadi tantangan berat bagi sumber daya manusia anggota Badan Usaha Milik Desa, yang menuntut strategi inovatif untuk memastikan daya saing lokasi wisata di tengah pandemi. Memanfaatkan kepercayaan dan pengalaman yang telah mereka dapatkan dalam pengelolaan pariwisata desa, Badan Usaha Milik Desa Berjo memulai perjalanan pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan.

Menyadari pentingnya meningkatkan pengalaman pengunjung, BUMDes Berjo memprioritaskan peningkatan fasilitas wisata, mengelola pedagang, mengatur fasilitas parkir, dan mengembangkan zona wisata. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang terus berkembang sambil mempertahankan daya tarik situs. Hasilnya, fasilitas yang ada terus mengalami peningkatan, menawarkan pengalaman yang semakin menarik bagi para pengunjung.

Manajemen Desa Wisata Berjo sangat menyadari bahwa untuk mempertahankan minat pengunjung, diperlukan perpaduan antara pemikiran inovatif dan kreativitas. Mereka memahami bahwa melengkapi fasilitas pariwisata dengan sentuhan inovasi dan kreativitas yang menarik sangat penting untuk menarik dan mempertahankan pengunjung, memastikan pengalaman yang menarik dan berkesan bagi semua pengunjung.

Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertamanya pada awal Maret 2020, menandai awal penyebaran yang cepat di seluruh wilayah. Istilah "COVID-19" berasal dari kata "coronavirus", "virus", dan "disease", dengan angka 19 yang mewakili tahun penemuannya di penghujung tahun 2019. Awalnya diidentifikasi oleh National Committee for Taxonomy of Viruses (NCTV) sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), World Health Organization (WHO) kemudian menetapkan sebagai COVID-19, dan mengakuinya sebagai penyakit baru. Gejala COVID-19 meliputi demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Nomenklatur yang tepat membantu dalam mengembangkan tes diagnostik, vaksin, dan perawatan, serta memfasilitasi penelitian tentang pencegahan, penularan, tingkat keparahan, dan pengobatan, yang mengarah pada klasifikasinya sebagai penyakit internasional oleh WHO (Olivia *et al.*, 2020).

Saat dunia memasuki tahun ketiga transisi dari pandemi ke status endemik, fokus utama Indonesia dalam merevitalisasi sektor pariwisata adalah membangun kepercayaan melalui adaptasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Komitmen pemerintah terhadap pemulihan

pariwisata terlihat jelas melalui berbagai peraturan yang bertujuan untuk mempercepat vaksinasi, melonggarkan pembatasan perjalanan, menerapkan program CHSE (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan), dan membangun sistem perbatasan terbuka tanpa karantina, yang semuanya ditujukan untuk peremajaan pariwisata nasional. Langkah-langkah ini telah diterima secara positif oleh para pemangku kepentingan di industri pariwisata, sehingga mendorong inisiatif tambahan seperti program pariwisata swasta selama masa transisi dan kolaborasi dengan influencer asing untuk meningkatkan kepercayaan di antara wisatawan internasional terhadap pariwisata Indonesia (Amelia & Prasetyo, 2022; Malik, 2022).

Dalam konteks yang luas, para ahli mendefinisikan pengunjung atau wisatawan dengan berbagai cara. Inskeep mencirikan wisatawan sebagai individu atau kelompok yang mengunjungi suatu tempat, baik negara, provinsi, kota, atau desa, yang berbeda dengan tempat tinggal biasanya, dengan tujuan utama bukan untuk mencari pekerjaan (Inskeep, 1991). Dengan demikian, definisi ini mengkategorikan wisatawan menjadi wisatawan sementara dan wisatawan. Wisatawan sementara tinggal di tempat tujuan setidaknya selama 24 jam, sedangkan pelancong menghabiskan waktu kurang dari 24 jam dan biasanya tidak menginap. Menurut Norval, pada tahun 1936, wisatawan adalah orang yang memasuki wilayah negara lain dengan tujuan selain mencari pekerjaan dan tempat tinggal tetap dan membelanjakan uangnya di negara yang dikunjungi, dan dananya tidak berasal dari negara tersebut (Fidgeon, 2010). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisatawan sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian, berdasarkan definisi ini, siapa pun yang melakukan perjalanan dianggap sebagai wisatawan atau pengunjung, terlepas dari tujuannya, selama perjalanan tersebut tidak melibatkan tinggal atau mencari nafkah di tempat tujuan.

Sebuah model merepresentasikan sebuah objek, ide, atau sistem dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model ini mencakup informasi tentang suatu fenomena yang dirancang untuk mempelajari sistem yang sebenarnya. Model juga dapat meniru objek, sistem, atau peristiwa yang sebenarnya dan mengandung informasi penting untuk analisis (Achmad, 2008). Istilah "model" berasal dari bahasa Latin "*modellus*", yang berarti "cetakan" atau "pola". Ada empat jenis model yang umum digunakan: sistem, mental, verbal, dan matematis (Cayaray, 2014).

Secara konseptual, pemberdayaan berkisar pada pemberian kekuasaan, yang berasal dari konsep dasar "kekuasaan" itu sendiri, yang menandakan otoritas atau kemampuan. Esensi dari pemberdayaan terkait erat dengan konsep kekuasaan, yang sering kali dikaitkan dengan kemampuan untuk memengaruhi tindakan orang lain terlepas dari keinginan atau kepentingan mereka. Pemberdayaan adalah "suatu proses untuk mendorong pengembangan kemampuan manusia yang beragam" (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Hal ini mencakup membangun kekuatan dengan menumbuhkan, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi individu, berusaha untuk memelihara dan membentengi kemampuan mereka (Minarni et al., 2017).

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat tertentu yang berada dalam kondisi miskin dan terbelakang (Sudarmanto et al., 2020). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan menumbuhkan partisipasi, motivasi, kesadaran, dan pengembangan potensi.

Dalam pemberdayaan masyarakat, ada empat prinsip yang biasa diterapkan untuk memastikan keberhasilan inisiatif pemberdayaan: kesetaraan, partisipasi, swadaya atau kemandirian, dan keberlanjutan (Najiyati et al., 2005).

- 1) Prinsip Kesetaraan: Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah prinsip kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan atau pendampingan, tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini mendorong dinamika yang setara dengan membangun mekanisme untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian, sehingga terjadi proses belajar bersama.
- 2) Partisipasi: Program pemberdayaan yang efektif yang mendorong kemandirian masyarakat bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Namun, untuk mencapai tingkat ini diperlukan waktu dan proses pendampingan yang menuntut komitmen mendalam terhadap pemberdayaan masyarakat.
- 3) Keswadayaan atau Kemandirian: Prinsip ini menekankan pada penghormatan dan prioritas pada kemampuan masyarakat daripada ketergantungan pada bantuan dari luar. Prinsip ini tidak memandang masyarakat miskin sebagai objek yang tidak mampu, melainkan sebagai individu yang memiliki sumber daya yang terbatas. Mereka memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang kendala usaha mereka, kesadaran akan lingkungan, tenaga kerja, tekad, dan kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat. Sumber daya ini harus dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk proses pemberdayaan. Bantuan materi dari luar harus dianggap sebagai pendukung, dengan memastikan bahwa bantuan tersebut tidak melemahkan kemandirian.
- 4) Keberlanjutan: Program pemberdayaan harus dirancang untuk keberlanjutan, meskipun dominasi fasilitator pada awalnya akan berkurang secara bertahap seiring dengan meningkatnya otonomi masyarakat dalam mengelola kegiatan mereka. Pada akhirnya, fasilitator akan ditarik ketika masyarakat menjadi mandiri.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemandirian individu dan masyarakat, yang mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka (Kruahong et al., 2023). Kemandirian ini dicapai melalui proses pembelajaran bertahap, di mana masyarakat memperoleh kemampuan atau kekuatan dari waktu ke waktu-tujuan pemberdayaan di tiga bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan di bidang-bidang tersebut.

Destinasi wisata, yang biasa disebut kawasan wisata, berfungsi sebagai tempat rekreasi atau pariwisata. Menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia Nomor KM.98/PW.102/MPPT-87, sebuah destinasi wisata dicirikan oleh sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia, seperti keindahan alam seperti gunung, pantai, flora, dan fauna, serta daya tarik buatan manusia seperti bangunan bersejarah, monumen, candi, dan pertunjukan budaya (Ananto, 2018). Destinasi wisata mencakup segala sesuatu yang ingin dikunjungi oleh wisatawan dan terkait erat dengan konsep objek wisata. Agar suatu daerah dapat dianggap sebagai objek wisata, daerah tersebut harus memiliki fitur unik yang menarik pengunjung, termasuk budaya lokal, lanskap alam, flora dan fauna, inovasi teknologi, dan elemen spiritual (Paulino et al., 2021). Oleh karena itu, destinasi wisata mencakup berbagai tempat atau kondisi alam yang dikembangkan untuk menarik wisatawan, termasuk objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, dan pantai, serta objek wisata buatan manusia seperti museum, benteng, dan situs bersejarah.

Kabupaten Karanganyar, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi yang cukup besar untuk memperdalam sektor pariwisatanya. Terletak di bawah Gunung Lawu, wilayah Karanganyar menawarkan suhu yang sejuk dan pemandangan indah yang memikat para wisatawan. Industri pariwisata yang sedang berkembang di Kabupaten Karanganyar

dibentuk oleh atraksi-atraksi wisata yang menarik pengunjung dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Di antara atraksi-atraksi tersebut, Telaga Madirda yang terletak di lereng Gunung Lawu merupakan salah satu yang paling menonjol. Dulunya merupakan sebuah telaga yang tenang dan dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun serta minim fasilitas dan infrastruktur wisata, Telaga Madirda telah bertransformasi di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo.

Meski mengalami kemajuan, pengembangan sarana dan prasarana di Telaga Madirda belum sepenuhnya selesai. Aksesibilitas masih menjadi tantangan, terutama untuk bus wisata, karena lokasinya yang berada di pegunungan dan hanya dapat diakses dengan sepeda motor dan mobil pribadi. Oleh karena itu, masih diperlukan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata ini.

Danau atau kolam adalah ekosistem yang menempati area yang relatif kecil dibandingkan dengan habitat laut dan darat, berbentuk cekungan. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, telaga dan kolam adalah badan air alami yang membentuk ekosistem, termasuk di dalamnya adalah badan air yang sejenis yang dikenal secara lokal. Telaga Madirda yang terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Tlogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, merupakan telaga alami yang memiliki mata air jernih yang mengalir sepanjang tahun dan membentuk air terjun mini. Awalnya dikelola oleh Pemerintah Desa Berjo sebagai objek wisata milik desa sejak awal tahun 2018, pengelolaan dialihkan ke Badan Usaha Milik Desa Berjo pada awal tahun 2020. Daya tarik Telaga Madirda terletak pada suasana alamnya yang tenang, mata air yang mengalir, fasilitas rekreasi, dan fasilitas berkemah yang tersedia di tepi telaga.

Dalam menganalisis hasil dari pemberdayaan BUMDes Berjo untuk mengelola objek wisata Telaga Madirda di tengah pandemi COVID-19 dan masa transisi pemulihan, studi ini mengadopsi prinsip-prinsip pemberdayaan yang diusulkan oleh Najiyati *et al.* (Najiyati *et al.*, 2005). Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan, partisipasi, swasembada atau kemandirian, dan keberlanjutan. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengikuti tiga tahap pemberdayaan: penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

Prosesnya, yang ditandai dengan kesadaran dan partisipasi, berlangsung sebagai berikut:

- 1) Tahap Penyadaran: Tahap awal ini menyasar masyarakat yang kurang mampu, dengan menekankan pada hak mereka untuk memiliki kemampuan. Memotivasi mereka untuk mengatasi kemiskinan adalah hal yang terpenting. Mempercepat proses ini melibatkan upaya pendampingan untuk mengevaluasi hasil.
- 2) Tahap Pengembangan Kapasitas: Berfokus pada pembekalan keterampilan bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk mengelola peluang, tahap ini mencakup pelatihan, lokakarya, dan kegiatan serupa untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat.
- 3) Tahap Pemberdayaan: Di sini, masyarakat diberikan kesempatan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga menumbuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan. Secara bertahap memberikan peran yang lebih besar sesuai dengan kapasitas dan aspirasi mereka, memandu evaluasi diri atas pilihan dan hasil implementasinya.

Berdasarkan tanggapan positif dari para pemangku kepentingan di Desa Berjo, khususnya manajemen Badan Usaha Milik Desa Berjo yang mengelola objek wisata Telaga Madirda, muncul peluang untuk menggali beberapa aspek kunci dalam meningkatkan jumlah pengunjung di masa pandemi COVID-19. Secara khusus, hal ini mencakup (1) seluk-beluk proses dan tahapan pemberdayaan, (2) implementasi model dan strategi pemberdayaan, dan

(3) kendala yang dihadapi dalam menjalankan model dan strategi pemberdayaan BUMDes Berjo untuk meningkatkan jumlah pengunjung di objek wisata Telaga Madirda.

Landasan dari proses pemberdayaan bergantung pada prinsip kesetaraan di antara para pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah desa, anggota BUMDes, komunitas bisnis di objek wisata Telaga Madirda, dan masyarakat Desa Berjo yang lebih luas. Prinsip ini menumbuhkan lingkungan hubungan yang setara, yang digarispawahi oleh pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang bertujuan untuk memajukan objek wisata Telaga Madirda. Saling mengakui kekuatan dan kelemahan masing-masing akan mendorong proses pembelajaran bersama.

Idealnya, pembelajaran dan penyelarasan visi harus secara organik berasal dari dalam, dengan partisipasi aktif dari setiap anggota BUMDes dan masyarakat. Namun, penting untuk mengakui bahwa mencapai keseimbangan ini bisa menjadi tantangan, terutama jika terjadi ketidakseimbangan. Dalam kasus seperti ini, bantuan atau intervensi dari luar menjadi sangat penting. Entitas seperti pemerintah Desa Berjo, pemerintah Kabupaten Karanganyar, LSM, organisasi masyarakat lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, universitas, lembaga koperasi/perbankan, dan lainnya memainkan peran penting sebagai fasilitator. Dukungan mereka sangat penting dalam memberdayakan anggota Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola pariwisata secara profesional, maju, dan sejahtera, sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Berjo.

Karena peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi kebaruan penelitian dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya, maka hasil penelusuran penelitian terdahulu yang terkait dengan model dan strategi pemberdayaan dalam mengelola objek wisata dirangkum sebagai berikut:

- 1) Mudana menganalisis inisiatif pemberdayaan di masyarakat Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, yang mengungkapkan strategi pemberdayaan yang didominasi oleh strategi tingkat mezzo (Mudana, 2015). Studi ini menyoroti contoh-contoh di mana strategi mikro dan makro digunakan, menumbuhkan dukungan untuk konservasi alam, pelestarian sosial-budaya, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di masyarakat.
- 2) Sebuah studi oleh Hilmy *et al.* meneliti efektivitas sistem terpusat dalam mengelola pariwisata Danau Telaga Madirda di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar (Hilmy *et al.*, 2020). Temuan menunjukkan bahwa zona pariwisata di Telaga Madirda telah dipersiapkan dengan cermat, dengan enam zona berbeda yang dipetakan untuk memenuhi berbagai komponen pariwisata. Sistem terpusat ini menyederhanakan pemrosesan kontur, sehingga memperkuat status Telaga Madirda sebagai objek wisata utama.
- 3) Sinaga *et al.* menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang (Sinaga *et al.*, 2021). Studi ini menggarispawahi pentingnya aspek demografi dan potensi daerah dalam perumusan kebijakan, dengan menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan.
- 4) Sagita *et al.* mengeksplorasi komunitas pertanian berkelanjutan di Perumahan Griya Taman Lestari, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang (Sagita *et al.*, 2021). Komunitas yang dibentuk selama pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan pertanian dan perikanan. Terlepas dari tantangan dalam partisipasi warga karena tahapan pemberdayaan yang tidak tepat, studi ini mengusulkan model untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong forum komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

- 5) Damayanti dan Indriyani menyelidiki dampak pembangunan Sirkuit Kuta Mandalika terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dari perspektif ekonomi Islam (Damayanti & Indriyani, 2021). Studi tersebut mengungkapkan hasil yang beragam, dengan beberapa perusahaan mengalami pertumbuhan sementara yang lain menghadapi tantangan karena kurangnya pemahaman tentang konsep dan strategi bisnis. Pengembangan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menggarisbawahi peran penting masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

Studi sebelumnya tentang pemberdayaan untuk pengelolaan objek wisata telah menjelaskan berbagai kebijakan, strategi, dan bentuk pemberdayaan, yang menekankan pada dinamisme melalui tindakan yang digerakkan oleh masyarakat dan analisis aspek struktural dan fungsional dalam tradisi lokal. Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam prinsip dan proses pemberdayaan, menumbuhkan komitmen yang kuat dari Badan Usaha Milik Desa untuk mengimplementasikan model-model inovatif seperti wisata spiritual dan memfasilitasi isolasi mandiri anggota masyarakat untuk pemulihan COVID-19 di Telaga Madirda. Selain itu, studi ini bertujuan untuk membangun jaringan kemitraan dalam komunitas pariwisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung selama pandemi.

Studi ini dirancang dengan tiga tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Kedua, studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model dan strategi pemberdayaan. Terakhir, studi ini bermaksud untuk menyelidiki kendala yang dihadapi dalam menerapkan model dan strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Berjo untuk meningkatkan pengunjung ke destinasi wisata Telaga Madirda.

2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pengumpulan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap karakteristik alami secara langsung dari sumbernya, dengan mengutamakan proses daripada hasil (Moleong, 2006). Analisis kualitatif dilakukan secara induktif, dengan fokus pada proses menghasilkan interpretasi yang bermakna (Moleong, 2006). Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid, reliabel, dan relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif interpretatif yang melibatkan pemilihan dokumen/data yang relevan, pengkodean, pembuatan catatan objektif dan reflektif, perangkuman data, dan triangulasi untuk memastikan kredibilitas data (Sugiyono, 2007).

Seperti yang dijelaskan oleh Wiliam Wiersma, triangulasi digunakan sebagai metode validasi silang kualitatif untuk menilai kecukupan data melalui konvergensi beberapa sumber data atau prosedur pengumpulan (Sugiyono, 2007). Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga sumber data, yaitu perangkat desa, ketua dan anggota BUMDes, serta kelompok-kelompok lain yang relevan. Triangulasi juga diterapkan pada teknik pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah (Bachri, 2010). Fase observasi berlangsung selama tiga tahun, dengan fokus pada setiap tahun: penilaian kesiapan, pengembangan model dan strategi, serta implementasi model dan strategi inovatif (Bachri, 2010).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keahlian mereka dalam memberdayakan desa wisata. Teknik pengambilan sampel purposif ini bertujuan untuk melibatkan individu dengan pengetahuan mendalam tentang masalah. Informan meliputi perangkat desa, pengurus BUMDes, sesepuh desa, tokoh masyarakat, dan anggota yang terlibat langsung dalam mengelola dan memberdayakan pariwisata desa di Telaga Madirda. Instrumen pengumpulan data utama adalah peneliti, yang melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi secara langsung.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Tahapan dan Proses Pemberdayaan

Telaga Madirda yang terletak di kaki Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar merupakan objek wisata milik desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjo. Terletak di tengah-tengah lanskap yang indah, telaga ini berada di ketinggian sekitar 1.050 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan udara pegunungan yang menyegarkan. Terletak di sebelah timur pusat Kabupaten Karanganyar, Telaga Madirda mudah dijangkau, berjarak sekitar 20 km dari Karanganyar dan 35 km dari Kota Solo.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola objek wisata Telaga Madirda, tiket masuk untuk pengunjung biasa dibanderol dengan harga Rp 15.000 per orang, dengan anak-anak dengan tinggi badan di bawah 110 cm tidak dipungut biaya masuk. Namun, harga tiket yang berbeda berlaku untuk pengunjung yang menginap atau berkemah. Jam kunjungan reguler adalah dari pukul 08:00 hingga 16:30 WIB. Namun, sejak pertengahan 2020, sebagai respon terhadap wabah COVID-19, Telaga Madirda telah memperpanjang jam operasionalnya untuk mengakomodasi wisatawan yang ingin menginap atau berkemah.

Pandemi COVID-19 membuat Telaga Madirda ditetapkan sebagai lokasi isolasi mandiri bagi pasien COVID-19, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan ketat yang melibatkan masyarakat dan tenaga medis. Inisiatif ini mendapatkan perhatian luas, dengan acara-acara khusus seperti kemah malam yang mendapatkan popularitas, terutama di platform media sosial. Acara ini menarik minat yang signifikan, menarik perhatian viral dan bahkan menarik partisipasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang memimpin upaya reboisasi di lereng Gunung Lawu. Tanggapan positif Gubernur Pranowo terhadap acara berkemah malam khusus di Telaga Madirda semakin membuat acara ini terkenal.



Gambar 1. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan warga menanam pohon untuk penghijauan skala besar, diikuti dengan kunjungan ke Telaga Madirda

Sumber: Humas Jawa Tengah (2021).

Mengenai penanaman pohon penghijauan dan inisiasi acara kemping malam, wawasan yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa Berjo, beberapa anggota Badan Usaha Milik Desa, dan Ki Warseno Slank, seorang dalang terkenal, menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian Telaga Madirda dan kawasan Gunung Lawu. Telaga Madirda yang sering disebut sebagai "gentongnya" Kabupaten Karanganyar membutuhkan perhatian dan pengelolaan yang berkesinambungan dari para pemangku kepentingan, masyarakat, dan pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah. Inisiatif penanaman pohon yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah diprioritaskan dan terus dilakukan, dengan menekankan pentingnya memelihara kearifan lokal sebagai aset wisata desa. Dengan luas sekitar 3,5 hektar, Telaga Madirda memiliki banyak mata air, enam di antaranya berukuran besar. Dikelola secara komersial sebagai tempat wisata alam oleh Badan Usaha Milik Desa Berjo dan warga, Telaga Madirda juga berfungsi sebagai fasilitas karantina untuk pasien COVID-19 dari pertengahan Mei hingga Juni 2020. Dengan pendekatan inovatif dengan memperkenalkan acara berkemah di malam hari, Kepala Desa Berjo berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas untuk wisata malam, memastikan tenda-tenda yang menarik dan nyaman dirancang untuk memanfaatkan panorama yang menakjubkan dan suasana sejuk Telaga Madirda di malam hari.

Inisiatif pemberdayaan bagi pengelola wisata desa di Telaga Madirda meliputi pengembangan prinsip-prinsip pemberdayaan dan model pelatihan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan harkat dan martabat para pengelola wisata, khususnya anggota Badan Usaha Milik Desa Berjo dan para pelaku usaha di destinasi wisata. Masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pariwisata melalui dorongan, motivasi, peningkatan kesadaran, dan pengembangan keterampilan. Namun, transisi pengelolaan awal ke BUMDes Berjo pada tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses jalan yang sempit dan tidak ditandai dengan baik, pengaturan zona wisata yang tidak profesional, berkurangnya jumlah pengunjung karena pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat yang kurang, dan praktik pengelolaan sampah yang kurang baik yang menyebabkan penumpukan sampah. Selain itu, sistem tiket tidak memiliki mekanisme yang tepat.

Terlepas dari kebutuhan pengembangan ini, Telaga Madirda tetap menjadi tujuan wisata yang menarik, dengan danau indah yang terletak di kaki bukit Gunung Lawu. Suasana yang tenang, ditambah dengan udara pegunungan yang sejuk, menawarkan pengunjung suasana yang tenang untuk berjalan-jalan santai di sekitar telaga yang masih asli, yang menampilkan daya tarik permata alam ini.

Sebagai pengelola, Badan Usaha Milik Desa Berjo tetap berdedikasi pada pengelolaan objek wisata ini secara profesional, terus berupaya untuk maju dan berkembang. Berkolaborasi dengan mitra yang berperan sebagai konsultan pemberdayaan, upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi dan inovasi model untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Oleh karena itu, dalam menilai kondisi manajemen dan fasilitas pariwisata saat ini, menerapkan prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan dan proses bertahap sangat penting. Hal ini melibatkan keterlibatan lembaga dan mitra kegiatan untuk menguraikan kegiatan dan melacak keluaran dan hasil yang dicapai, seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tahapan Model Pemberdayaan untuk Manajer Destinasi Wisata Telaga Madirda

Tahapan	Kegiatan/Model	Mitra dan Kontributor	Hasil
Kesadaran	Konseling, pertemuan, FGD	Tingkat Kabupaten, kecamatan, desa	▪ Identifikasi model dan strategi pemberdayaan bagi pengelola wisata Telaga Madirda ▪ Peningkatan kesadaran di antara para pengelola mengenai pentingnya prinsip-prinsip pemberdayaan
Pengembangan Kapasitas	Pelatihan dan praktik	▪ Konsultan, pendamping dari universitas dan lembaga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar ▪ Tim Matching Fund, Pembicara dari berbagai universitas	▪ Pelatihan promosi pariwisata yang inovatif dan pengembangan potensi budaya lokal ▪ Model pembuatan cinderamata, pemilahan dan pengolahan sampah ▪ Model kerajinan batik bermotif, peningkatan administrasi kelembagaan dan kemitraan
Pemberdayaan	Keterlibatan berbagai pihak	▪ Bupati Karanganyar ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ▪ Tim Matching Fund ▪ Pembicara dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Batiik Surakarta ▪ Ki Warseno Slank	▪ Pertumbuhan komitmen dan antusiasme kepemimpinan, peningkatan keterampilan komunikasi struktural

Sumber: Analisis data primer, diadaptasi dari penelitian Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Tabel di atas menguraikan tiga tahap penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan, yang menyoroti penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan secara konsisten untuk mengidentifikasi model dan strategi yang digunakan oleh pengelola objek wisata Telaga Madirda. Upaya-upaya ini melibatkan sesi penyuluhan, pertemuan, dan diskusi kelompok terarah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, yang dilengkapi dengan pelatihan langsung

dan penerapan berbagai model inovatif. Model-model ini mencakup promosi pariwisata, pengembangan budaya lokal, pembuatan cinderamata, pengelolaan limbah, dan perbaikan administrasi, yang difasilitasi oleh konsultan dan tenaga ahli dari berbagai universitas dan lembaga, termasuk Bupati Karanganyar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, serta berbagai lembaga akademis.

Keterlibatan para pemangku kepentingan ini telah mengarah pada pelaksanaan beberapa kegiatan pengembangan pariwisata, yang menghasilkan peningkatan komitmen kepemimpinan, peningkatan keterampilan komunikasi di dalam badan usaha milik desa, dan keberhasilan pengadaan bantuan APBN dan dana pembangunan desa. Selain itu, rencana pengembangan infrastruktur, seperti pelebaran jalan, perencanaan fasilitas, dan acara berkemah di malam hari, telah dimulai untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk membangun pusat isolasi COVID-19.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pariwisata, termasuk fitur air, gazebo, toilet umum, dan ruang ibadah, dengan tetap berfokus pada kelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah dan inisiatif reboisasi. Rencana-rencana tersebut mencakup pengadaan kereta gantung, pengolahan air minum, dan pengembangan atraksi berkemah di malam hari yang inovatif, dengan menekankan keterlibatan masyarakat dan kemitraan.

Upaya-upaya yang cermat ini, dipandu oleh evaluasi dan perencanaan strategis yang berkesinambungan, bertujuan untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menumbuhkan optimisme di antara para pengelola untuk meningkatkan jumlah pengunjung lebih lanjut dan meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan di Telaga Madirda.

3.2. Implementasi Model dan Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah pendekatan mendasar yang harus menjadi prinsip panduan bagi semua lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan perusahaan dalam memenuhi peran dan tanggung jawab mereka untuk menyediakan layanan sosial, karena hasilnya bermanfaat bagi berbagai kelompok. Penelitian Mardikanto mengidentifikasi tiga kelompok penerima manfaat pemberdayaan di dalam masyarakat: (1) kelompok utama yang terdiri dari masyarakat dan keluarganya; (2) kelompok penentu yang terdiri dari para pengambil keputusan terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan (3) kelompok pendukung, yang meliputi pemangku kepentingan lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberdayaan (Mardikanto, 2003).

Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan strategis untuk memastikan bahwa penerapan model pemberdayaan secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan, yang menurut Sumodiningrat merupakan kegiatan yang mampu memfasilitasi pemberdayaan. Penting bagi BUMDes Berjo untuk menganalisis dengan cermat penerapan model dan strategi yang optimal, baik secara kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugas, untuk mengelola destinasi wisata Telaga Madirda secara efektif.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan melalui pemanfaatan model dan strategi inovatif untuk event wisata kemah malam dilengkapi dengan penerapan model peningkatan fasilitas wisata dan perintisan kemajuan layanan wisata di Telaga Madirda. Hal ini didukung dengan membangun kemitraan pendampingan dan pengelolaan destinasi wisata ini secara cermat melalui konsultasi dengan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Penerima manfaat langsung dari model pemberdayaan ini meliputi pengelola destinasi, Badan Usaha Milik Desa, dan operator wisata Telaga Madirda.

Selain mengidentifikasi model dan strategi pemberdayaan melalui proses pentahapan yang konsisten, penelitian yang dilakukan di lapangan juga menemukan prinsip penting yaitu "komitmen" yang melampaui teori pemberdayaan konvensional. Prinsip ini meliputi (1) kesetaraan, (2) partisipasi, (3) keswadayaan atau kemandirian, dan (4) keberlanjutan (Najiyati et al., 2005). Namun, pada tataran implementasi, terbukti bahwa keempat prinsip tersebut tidak sepenuhnya dapat mencapai target pemberdayaan yang diinginkan.

Studi ini menunjukkan bahwa, selain dedikasi BUMDes sebagai pengelola Telaga Madirda dan keterlibatan berbagai pendamping, komitmen yang kuat dari para pemimpin, khususnya Kepala Desa Berjo, sangat diperlukan. Tanpa komitmen tersebut, efektivitas penerapan model dan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan kemajuan dan kinerja BUMDes Berjo akan terganggu, sehingga menghambat pencapaian target yang optimal.

Oleh karena itu, "komitmen" muncul sebagai temuan baru yang melengkapi prinsip-prinsip pemberdayaan yang sudah ada (Najiyati et al., 2005). Model pemberdayaan, yang ditopang oleh konsep-konsep utama dari prinsip-prinsip ini dan pendekatan bertahap, harus dilengkapi dengan komitmen kepemimpinan. Misalkan kelima prinsip pemberdayaan tersebut-kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, keberlanjutan, dan komitmen pimpinan-diterapkan secara efektif melalui tahapan-tahapan pemberdayaan. Dalam hal ini, upaya penerapan model dan strategi pemberdayaan BUMDes Berjo dapat meningkatkan jumlah pengunjung di Telaga Madirda pada masa pandemi COVID-19 dan pada fase pemulihan ekonomi pascapandemi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk memenuhi kontrak. Komitmen adalah suatu sikap di mana individu yang berkomitmen bersedia untuk berinvestasi dalam organisasinya (Mowday et al., 1979). Mereka cenderung untuk berkontribusi pada keuntungan organisasi untuk memastikan kesejahteraannya (Muslim, 2013). Komitmen dibingkai dalam komitmen kepemimpinan. Hal ini sangat relevan karena penelitian ini berfokus pada pengelola objek wisata Telaga Madirda di Desa Berjo, yang memerlukan kolaborasi lintas organisasi. Dengan demikian, komitmen kepemimpinan organisasi menandakan keterlibatan dan representasi organisasi yang kuat. Untuk mencapai tujuan bersama dalam skenario kolaboratif, seorang pemimpin harus mendorong kerja sama dan menginspirasi individu untuk bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks ini, komitmen kepemimpinan terhadap pemberdayaan melalui penerapan model pemberdayaan pengelola objek wisata dapat dipahami sebagai kesediaan pemimpin, khususnya Kepala Desa Berjo, untuk melakukan lebih dari yang seharusnya untuk meningkatkan proses dan layanan pemberdayaan melalui model pemberdayaan pengelola pariwisata. Komitmen ini bertujuan untuk memaksimalkan inovasi, sehingga meningkatkan kualitas acara dan tampilan pariwisata secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, proses pemberdayaan dalam mengelola objek wisata merupakan tanggung jawab bersama antara ketua, anggota BUMDes, dan pelaku wisata di Desa Berjo. Oleh karena itu, komitmen pimpinan yang diwujudkan oleh Kepala Desa Berjo sebagai pelaksana diharapkan dapat membangkitkan semangat dan loyalitas anggota BUMDes dan para pendamping, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Komitmen kepemimpinan merupakan janji yang teguh dari pemimpin yang berdedikasi untuk menarik lebih banyak pengunjung dan bertekad untuk melakukannya dengan sepenuh hati dalam situasi apa pun.

Penyelenggaraan acara malam hari dan pengembangan destinasi wisata Telaga Madirda akan meningkatkan daya tarik objek wisata ini, terutama mengingat kondisi sumber mata airnya yang masih asli. Meskipun ukurannya kecil, mata airnya tetap mengalir dengan stabil, bahkan selama musim kemarau yang panjang. Telaga Madirda menjadi terkenal sebagai tujuan wisata alam karena pengembangannya yang profesional melalui berbagai model yang inovatif. Hasilnya, pemandangannya memancarkan keindahan dan pesona yang luar biasa. Dalam perkembangannya, Telaga Madirda telah dilengkapi dengan berbagai atraksi dan fasilitas tambahan, termasuk pendopo dan tempat swafoto yang dihiasi dengan papan nama Telaga Madirda sebagai latar belakang. Para pasangan yang melakukan pemotretan pra-pernikahan juga menyukai tempat ini.

Selain itu, beberapa titik dan area berkemah dilengkapi dengan sumber energi bertenaga surya. Rencana termasuk pembangunan dermaga kecil untuk berfungsi sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal kecil, di samping proposal untuk flying fox dan kereta gantung. Jika berhasil diimplementasikan sebagai model inovasi dan pengembangan fasilitas pariwisata, Telaga Madirda akan menarik lebih banyak pengunjung, meningkatkan pendapatan pengelola pariwisata, dan memberi manfaat bagi penduduk Desa Berjo.

3.3. Tantangan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Pariwisata Telaga Madirda

Pemberdayaan masyarakat memerlukan pengembangan prinsip-prinsip dan proses bertahap untuk memperkuat faktor internal masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat melalui fasilitasi. Proses ini juga melibatkan dukungan dari pihak eksternal yang secara aktif membantu pengelola pariwisata dan menunjukkan komitmen kepemimpinan. Untuk mencapai tujuan akhir pemberdayaan masyarakat, yaitu memberdayakan pengelola dan pelaku usaha pariwisata, para pemangku kepentingan harus secara konsisten mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang ada di destinasi wisata di lokasi tersebut, dengan mengimplementasikan program-program yang bersifat kolaboratif. Namun, perlu diakui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata Telaga Madirda sering menemui kendala. Pengelola wisata dan staf yang mendampingi menghadapi berbagai tantangan, termasuk:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan
Anggota Badan Usaha Milik Desa dan pelaku usaha pariwisata mungkin kurang memiliki kesadaran, pengetahuan, pengalaman, dan konsep diri dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Keterampilan yang Kurang Memadai
Anggota BUMDes dan pelaku usaha pariwisata mungkin kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha pariwisata secara efektif.
- 3) Prioritas yang Bersaing
Individu mungkin memprioritaskan kegiatan yang menghasilkan uang daripada pemberdayaan masyarakat karena profesi, pekerjaan, dan komitmen sosial dan budaya mereka, seperti kegiatan keagamaan atau ekonomi.
- 4) Interaksi yang Terbatas
Interaksi yang terbatas dengan masyarakat luar menyulitkan mitra/fasilitator untuk terlibat dalam forum-forum yang ada, seperti kelompok tani, PKK, dan Karang Taruna.
- 5) Promosi Pariwisata yang Tidak Memadai:
Kurangnya promosi melalui media cetak (koran, poster, brosur) dan media elektronik menghambat visibilitas pariwisata Telaga Madirda.

6) Konflik Kepentingan:

Perbedaan persepsi antara anggota BUMDes dan pelaku usaha dapat menimbulkan konflik kepentingan, sehingga menghambat pelaksanaan program pengembangan pariwisata dan mengurangi antusiasme pengelola pariwisata desa.

7) Persaingan dari Destinasi Wisata Lain:

Pertumbuhan dan perkembangan destinasi wisata lain yang dikelola oleh pemerintah desa atau sektor swasta menghadirkan persaingan dengan acara dan penawaran yang menarik, sehingga mendorong pengelola wisata Telaga Madirda untuk terus berinovasi agar tetap dapat bersaing dan menarik minat pengunjung.

Hambatan-hambatan yang teridentifikasi melalui wawancara dan observasi, terutama berasal dari faktor internal di dalam komunitas organisasi BUMDes dan para pelaku usaha di wisata Telaga Madirda. Namun, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam anggota BUMDes Desa Berjo dan pelaku usaha pariwisata melalui sumber daya fasilitasi yang didukung oleh bantuan sumber daya manusia dari pihak eksternal yang bertindak sebagai konsultan dan pendamping. Pada akhirnya, pemberdayaan pengelola lokasi wisata bertujuan agar mereka mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sesuai dengan kapasitasnya melalui prinsip-prinsip dan tahapan pemberdayaan, secara konsisten melaksanakan program bersama dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Studi ini mengkaji model dan strategi pemberdayaan melalui pendekatan bertahap, yang didukung oleh mitra pemberdayaan, untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata Telaga Madirda. Penerapan model pemberdayaan melalui tiga tahap-penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan-secara konsisten dan efektif telah meningkatkan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya komitmen dan antusiasme pimpinan dalam mengelola wisata Telaga Madirda serta meningkatnya kemampuan komunikasi struktural dari Badan Usaha Milik Desa, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan bantuan APBN dan melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan.

Studi ini juga menyoroti pentingnya pelaksanaan acara wisata baru, seperti berkemah di malam hari, dan meningkatkan fasilitas pariwisata, di samping membangun kemitraan dan memanfaatkan jaringan masyarakat untuk tujuan promosi dalam meningkatkan pengelolaan destinasi wisata. Temuan yang penting adalah munculnya "komitmen" sebagai aspek baru dalam penelitian ini, melengkapi teori-teori yang sudah ada tentang prinsip-prinsip pemberdayaan. Dengan mengimplementasikan lima prinsip pemberdayaan secara efektif - kesetaraan, partisipasi, kemandirian, keberlanjutan, dan komitmen kepemimpinan - melalui tahapan-tahapan pemberdayaan, studi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan BUMDes Berjo dapat secara efektif meningkatkan jumlah pengunjung di Telaga Madirda, terutama selama masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun, hambatan internal di dalam BUMDes Berjo, terutama konflik yang timbul dari perbedaan persepsi antara anggota BUMDes dan pelaku usaha, diidentifikasi sebagai tantangan. Studi ini merekomendasikan langkah-langkah segera untuk menjembatani kepentingan pihak-pihak ini untuk meminimalkan gesekan dan meningkatkan dukungan untuk program pengembangan pariwisata Telaga Madirda, yang pada akhirnya akan meningkatkan antusiasme para pengelola pariwisata desa.

Pengurus baru BUMDes Berjo perlu mengedepankan komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan agar dapat secara konsisten mengelola objek wisata Telaga Madirda secara profesional, inovatif, dan menyejahterakan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Berjo.

5. Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang bersedia bekerja sama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan potensial terkait penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Achmad, M. (2008). *Teknik Simulasi dan Pemodelan*. Universitas Gadjah Mada.
- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2022). Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment) Terhadap Objek Wisata Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(2), 92–99. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i2.49461>
- Ananto, O. (2018). Persepsi Pengunjung Pada Objek Wisata Danau Buatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 1–11.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(1), 46–62.
- Cayaray, S. (2014). *Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa*. Universitas Indonesia.
- Damayanti, S., & Indriyani, I. (2021). Dampak Pembangunan Sirkuit Kuta Mandalika terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 1(3), 21–27. <https://doi.org/10.31764/jseit.v1i1>
- Espinoza-Figueroa, F., Vanneste, D., Alvarado-Vanegas, B., Farfán-Pacheco, K., & Rodriguez-Giron, S. (2021). Research-based learning (RBL): Added-value in tourism education. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education*, 28, 100312. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2021.100312>
- Fidgeon, P. R. (2010). Tourism education and curriculum design: A time for consolidation and review? *Tourism Management*, 31(6), 699–723. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.019>
- Hilmy, M. N., Daryanto, T. J., & Pitana, T. S. (2020). Efektivitas Sistem Memusat pada Tata Massa Wisata Telaga Madirda di Karanganyar. *Senthong: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*, 3(1), 272–281.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. John Wiley & Sons, Inc.
- Kruahong, S., Tankumpuan, T., Kelly, K., Davidson, P. M., & Kuntajak, P. (2023). Community empowerment: A concept analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 79, 2845–2859. <https://doi.org/10.1111/jan.15613>
- Malik, Y. I. (2022). Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Sentris*, 3(1), 74–89. <https://doi.org/10.26593/sentris.v3i1.5643.74-89>

- Mardikanto. (2003). *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluh Pertanian*. Penerbit Puspa.
- Minarni, E. W., Utami, D. S., & Prihatiningsih, N. (2017). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal dan Berkelanjutan. *JPPM: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 147. <https://doi.org/10.30595/jppm.v1i2.1949>
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224–247. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(79\)90072-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(79)90072-1)
- Mudana, I. W. (2015). Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 598–608. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6381>
- Muslim, S. B. (2013). *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*. Alfabeta.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International - Indonesia Programme.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Paulino, I., Lozano, S., & Prats, L. (2021). Identifying tourism destinations from tourists' travel patterns. *Journal of Destination Marketing and Management*, 19, 100508. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100508>
- Sagita, I. N., Delianoor, N. A., & Afifah, D. F. (2021). Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Lestari Farm dalam Menjaga Ketahanan Pangan Masa Pandemi Covid-1. *Kumawula*, 4(1), 157–164. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32431>
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 79–90. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.163>
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., & Simarmata, M. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, 1(1).
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo.

Tentang Penulis

1. **Yitno Puguh Martomo** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Diponegoro, pada tahun 2019. Penulis adalah dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Surakarta, Indonesia.
E-Mail: yitnopuguh_martomo@unsa.ac.id

2. **Samsi** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Sebelas Maret, pada tahun 2020. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Surakarta, Indonesia.
E-Mail: samsi_rosi@unsu.ac.id
3. **Erwinda Sam Anafih** memperoleh gelar Magister dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Indonesia.
E-Mail: erwindasam@umuka.ac.id
4. **Liem Gai Sin** memperoleh gelar Ph.D dari University of Central Queensland, Australia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Inovasi, Program Pascasarjana, Universitas Ma Chung, Indonesia.
E-Mail: liem.gaisin@machung.ac.id